LAPORAN HASIL PENELITIAN

KONFLIK LOKAL
PERCIKAN DISINTEGRASI NASIONAL:
STUDI KASUS TAWURAN ANTARKAMPUNG
DI KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH

Oleh:
Drs. Agus Maladi Irianto, MA
Drs. Mudjahirin Thohir, MA
Drs. Suharyo, M.Hum

PUSAT PENELITIAN SOSIAL BUDAYA
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
HALAMAN PENGESAHAN

   b. Bidang Ilmu : Sosial
   c. Kategori Penelitian : II (Pemecahan masalah: pembangunan)

2. Ketua Peneliti :
   a. Nama Lengkap dan gelar : Drs. Agus Maladi Irianso, MA
   b. Jenis Kelamin : Laki-laki
   c. Gol/ Pangkat dan NIP : III DI Penata TK I/131 672 469
   d. Jabatan fungsional : Lektor Madya
   e. Jabatan struktural :
   f. Fakultas/ Jurusan : Puslit Sosial Budaya

3. Jumlah anggota peneliti : 2 (dua) orang
   a. Nama anggota peneliti I : Drs. Mujahirin Thohir, MA
   b. Nama anggota peneliti II : Drs. Suharyo, M. Hum

4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah

5. Lama penelitian : 8 bulan
6. Biaya yang diperlukan :
   a. Sumber dari Depdiknas : Rp. 6.000.000
   b. Sumber lain :
   Jumlah :
   Rp. 6.000.000
   (Enam juta rupiah)

Semarang, Oktober 2002

Mengetahui
Ketua Puslit Sosbud
Lembaga UNDIP

[Signature]

Prof. Dr. A.M. Djuliati Suryo
NIP 130 516 885

Ketua Peneliti

[Signature]

Drs. Agus Maladi Irianso, MA
NIP 131 672 469

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

[Signature]

Prof. Dr. dr. Ign. Rivanto
NIP 130 529 454
<table>
<thead>
<tr>
<th>Chapter</th>
<th>Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>PENDAHULUAN</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A. Latar Belakang</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B. Perumusan Masalah</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C. Tinjauan Pustaka</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D. Tujuan Penelitian</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E. Kontribusi Penelitian</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F. Metodologi</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>GAMBARAN UMUM WILAYAH KONFLIK</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A. Lokasi, lingkungan alam, dan tingkat kepadaan penduduk</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B. Mata Pencaharian</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C. Tingkat Pendidikan, Agama, dan Aspirasi Politik</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>ANALISIS STRUKTUR KONFLIK</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A. Sinopsis Kekerasan Sosial</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B. Desain Panggung Kekerasan Sosial</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C. Skenario Kekerasan Sosial</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>KEŞIMPULAN</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Pustaka</td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
RINGKASAN
KONFLIK LOKAL PERCIKAN DISINTEGRASI NASIONAL: STUDI
KASUS TAWURAN ANTAR KAMPUNGAN DI KABUPATEN TEGAL

Oleh
Agus Muladi Irwanto, Muhajarin Thohir, Subaryo

Pusat Penelitian Sosial Baswayi, Universitas Diponegoro
Tahun 2002, 53 halaman
SPK No. 01894-LTDBPK-SDM/TV/2002

Maralah yang dikenal dalam penelitian ini adalah kekerasan sosial yang
diskrepansi dalam bentuk tawuran antar kampung di Kabupaten Tegal. Oleh
karena itu hal yang dicari jawabnya adalah: ajaran permasalahan, motivasi,
sinaran, dan tujuan yang harus dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat
tawuran. Di masing-masing, digali pula kelompok-kelompok penggerak dan jaringan-
ragam kerja serta dampak sosial-nikologi masyarakat yang menjadi
sumber tawuran.

Sumber dan diperoleh dalam tiga tahun, Pertama, mengkaji pemberitaan-
penelitian kekerasan sosial, khususnya tawuran yang diman di media massa.
Kedua, melakukan pengamatan di daerah konflik. Ketiga, melakukan wawancara
menalaman dengan teknik Snowball terhadap subjek penelitian (masyarakat auran,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi sosial dan aparatur keampanan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sebagai akar
permasalahan yang stama, terutama persaingan dalam menguasai hasil buntut
Hutan di mata mereka dipersepsi dalam dua (a) terpaksa mengurangi dan (b)
merasai menilai. Dari sini saya mencontoh ungkapan "jika mereka makan
aparat/orang lain", menguap kita tidak ikut makan juga". Akibat perwakai
tersebut, mereka melakukan keterisian sosial dengan kesadaran reziko yang akan
dihalupi, yaitu dipaksa, ditahan, atau dipenuhi. Oleh sebab itulah, cair sebagai
bentuk "latihan" menghidupi hal-hal tersebut. Sebab akibat dari keterisian
dan reziko yang pasi dihadapi, berkembanglah sikap curiga pada pihak lain/orang
lain, sehingga umumnya perluadah perwakai sosial kongso atau atau sebagai ciri
mengalami. Hal ini pada gilirannya memiliki segregasi sosial. Tawuran ini juga
menyebabkan rasa demos pada betul atas masyarakat yang menjadi
sasaran ancaman masal.

Saran yang dapat diberikan adalah pertolakan rehabilitasi baik fisik maupun
nikologi. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi perasaan sedih, frustasi, dan
sikap balas dendam.
SUMMARY

THE LOCAL CONFLICT
AS A REFLECTION OF THE NATIONAL DISINTEGRATION;
A CASE STUDY OF INTERVILLAGE AMOK IN TEGAL REGENCY

By
Agus Mutadi Iranto, Muhajarin Tohir, and Subaryo

The Research Center for Social and Cultural Affairs
Year 2002, 55 pages
SPK NO. 0189/LIT/BBPK-STK/IV/2002

The research studies social riots as expressed in the form of inter-village amok 'nawaran' in Tegal Regency. The study tries to find out the factors, motives, and target of the people involved in such amok. This research also tries to identify the motivators and their networks and its psychological and social impacts on the society.

The data are obtained in three steps. First, the data are obtained through the news analysis of social riots, especially in mass media. Second, they are obtained through observation in the conflict area, and the last, using snowball technique, the data are obtained through interview with the subjects of this research including common people, formal leaders, leaders of religions, leaders of social organization, and leaders of local army and police.

The result shows that economic factor is the main source of all social riots, especially the competition to have an access on forest products. For them, forest can have two different values, possession or something to rob. There is a saying 'If they can rob the forest products, why cannot we'. Due to this perception, they commit social riots with their own risks such as being kicked, arrested, or even being imprisoned. Therefore, alcoholic risk 'cito' is perceived as a 'practice' to face the risks. As a result of this, a suspicion among the society has developed and therefore the social attitude called 'friend or enemy' 'komo' or 'seteru' as the characteristics of brunt people 'wong alasan'. This, in turn, will create social segregation and cause the society to become the target of the amok to take a revenge.

It is suggested that physical or psychological rehabilitation be given to them in order to eliminate sad, frustrated and revenge feelings.
BAB I
Pendahuluan

A. Latar belakang


Jawa Tengah meskipun tergolong dalam satu kesatuan kebudayaan Jawa, namun sebagai kesatuan wilayah ia menunjukkan wilayah yang majemuk. Didorong oleh pemekaran wilayah, dan perkembangan masing-masing kota yang merupakan konsekuensi dari dinamika sosial suatu wilayah itu, maka masalah kemajemukan di Jawa Tengah tak bisa tehnolog. Kemajemukan itu terjadi, baik menyanyakut latar belakang agama, golongan sosial, maupun kemajemukan yang disebabkan penyeberan etnik selain Jawa. Apakah dengan adanya kemajemukan kemudian melahirkan konflik sosial?

Kemajemukan tersebut pada dasarnya hanya menjadi salah satu indikasi terciptanya konflik sosial masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, konflik sosial aken melatarbelakangi terganggunya kenyamanan perasaan, pikiran, dan tindakan setiap individu dalam rangka berinteraksi dengan sesama di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain, konflik sosial merupakan perluasan dari konflik individual, yang umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik, dan biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang.

Jika konflik sosial melahirkan ketidaknyamanan perasaan, pikiran, dan tindakan setiap individu dalam rangka berinteraksi, maka pengertian konflik lebih cenderung diasumsikan secara negatif. Akan tetapi konflik bisa diasumsikan secara netral. Artinya, konflik adalah suatu kondisi yang diambil oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan, biasanya kekuatan-kekuatan tersebut bersumber pada keinginan manusia atau masyarakat.

Atau dengan kata lain, ekspresi kekerasan sosial yang melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya pada dasarnya bisa bermula dari perselisihan yang tak direncanakan (unplanned violence) dan juga berlaku dari suatu perencanaan (planned violence) yang jelas dan sasarannya.

Secara garis besar murzulnya indakak kekerasan disebabkan dua hal, yakni prakondisi dan tipologi. Prakondisi bisa mengerah pada timbulnya kekerasan karena adanya masalah-masalah internal dan peristiwa-peristiwa eksternal. Masalah internal bisa menyanygkut pada tabrakan-tabrakan kepentingan antar individu pada satu sosial, baik dalam rangka pengusahaan jabatan, fasilitas, maupun perubahan sumber daya, tingkah laku yang tersedia. Individu yang terlibat konflik mencoba memperbesar isu kepentingan kelompok yang lebih luas untuk melegitimasi indakak kekerasan yang mereka lakukan (trianto, 1999).

Kekerasan sosial tanpa direncanakan, adalah suatu bentuk kekerasan sosial yang kemunculannya bisa bersifat spontan, bersifat lokal, dan kurang atau tidak adanya target-target tertentu kecuali kebutuhan untuk mengekspresikan kekerasan itu sendiri. Sedangkan kekerasan sosial direncanakan, meskipun melibatkan orang-daerah atau pelakunya orang setempat, tetapi secara sistematis telah diperhitungkan nilai untung ruginya.

Para penggerak terhadap munculnya kekerasan sosial yang direncanakan umumnya telah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan secara sepintas dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam kekerasan sosial yang direncanakan, tindak kekerasan sosial itu umumnya
ditempatkan sebagai suatu strategi. Sebagai suatu strategi, maka tindak kekerasan sosial merupakan suatu pilihan.

Strategi pemilihan tindak kekerasan sosial, dapat dilihat pula ke dalam beberapa asumsi. Pertama, bahwa dalam masyarakat yang bersangkutan, memang telah dan sedang terjadi persaingan untuk memperolehkan sumber-sumber daya alam maupun sumber-sumber daya lingkungan. Sumber-sumber daya alam umumnya berkaitan dengan masalah sumber-sumber ekonomi, sedang sumber-sumber daya lingkungan, bisa menyangkut perebutan sumber-sumber atau posisi-posisi strategis, baik dalam persaingan maupun politik. Sumber-sumber daya alam atau lingkungan yang ada, sehingga muncul persaingan baik terexploitasi atau terbuak.

Jika bukan karena sumber daya alam dan lingkungan yang terbatas, maka masyarakat manusia sendiri yang tidak memiliki batasan kepuasan terhadap apa yang telah didepatkan. Kelalu yang terjadi demikian, maka kelompok-kelompok lain akan dirilis sebagai suatu ancaman.

Kedua, pilihan terhadap bentuk kekerasan sosial dalam rangka memperolehkan sumber daya alam maupun sumber daya lingkungan itu merupakan suatu manifestasi dari kemampuan individu atau kolektif yang terlibat ke dalamnya, yaitu bahwa mereka baru bisa memperolehkan persaingan ke dalam bentuk seperti itu².

Ketiga, adanya kelompok tertentu yang berlatar belakang politik tertentu, maupun kelompok status dan yang menghendaki timbulnya konflik sosial dengan kekerasan untuk mendiskreditkan pemerintah reformasi, sehingga memungkinkan mereka bisa memperoleh posisi strategis kembali.

Atas dasar penalaran tersebut di atas, kekerasan sosial dapat dilihat sebagai hal yang hajar dan tidak wajar. Kewajaran di sini menyangkut pada

1 Persisangan-persisangan itu, dalam satu sisi, menuntutkan sistem penggunaan, tetapi pada satu lain, sebagai akibat dari sistem penggunaan itu, akan terjadi aka perlawanan. Persiangan untuk memperolehkan sumber-sumber ekonomi dalam satu sisi adalah positif karena dapat mendorong pembaharuan yang bermanfaat untuk menjaga keberlanjutan sumber-sumber saat ini dan potensi yang dimiliki. Sementara itu, pihak lain adalah negatif luatnya cara-cara untuk memperolehkan ini tidak melalui asasan mrn (rule of the game) yang jelas apalagi kalau terjadi diantar atau predios adanya baik lewat kriminal-kriminal politik maupun praktik-praktik yang tidak benar dan dilakukan, seperti yang banyak terjadi dalam banyak terhadap dan portatif pada masa aksi pemerintah ordre baru.

2 Kekerasan sosial dapat muncul melalui berbagai bentuk dari media, yaitu lion, tolol, maupun bentuk fisik. Dalam bentuk lipat seperti hujatan, pelecehan. Moda yang digunakan biasa untuk mempunyai bentuk (sosial) seperti rumor, fitnah, deb. Tetapi bias mempunyai bentuk seperti hukum, kartun, deb.
penjelasan akal sehat kita yaitu bahwa sosial orang atau setiap kelompok masyarakat, sebutulnya berada dalam situasi konflik.

Menjadi tidak wajar deh karena alasan etika sosial dan kemanusiaan. Alasan etika sosial karena manusia Indonesia termasuk masyarakat daerah Tegal, pada dasarnya dibangun dan diharapkan menjadi manusia yang memiliki toleransi, mudah memaafkan, dan bisa hidup secara damai dengan sesama. Akan kemanusiaan karena pada dasarnya setiap terjadinya konflik sosial dengan kekerasan akan berakibat kemakin menyengsarakan rakyat bawah.

Atas dasar etika sosial, kemanusiaan, dan kepentingan terhadap pertanyaan dijuga dan dikukuhkannya persatuan dan kesatuan nasional itu, maka diperlukan suatu solusi bagi masyarakat yang sedang berkonflik ke arah solusi damai. Untuk dapat mengarahkan kepada solusi damai terhadap masyarakat daerah Tegal yang sedang berkonflik, perlu lebih dahulu dipelajari secara cermat akar permasalahanannya, kelompok-kelompok yang terlibat kekerasan, motivasi dan tujuan dari tindak kekerasan dimaksud.

B. Perumusan Masalah

Menyimak peristiwa tersebut bisa jadi tergolong dalam kategori konflik lokal, namun bila secara masif terjadi korban jiwa dan terbakarnya ratusan rumah maka ia tidak bisa dianggap sebagai peristiwa sederhana. Ia akan menjadi percikan potensial yang bakal mempengaruhi gambaran desintegrasi di Jawa Tengah ini.

Untuk itu, yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mungkin warga yang sudah bertahun-tahun hidup bertetangga ternyata terlibat konflik yang kemudian merugikan harta dan jiwa?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu dijelaskan hipotesis sebagai berikut. PERTAMA, konflik lokal terjadi karena ada perebutan sumber daya ekonomi di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jika terjadi konflik akibat adanya sumber daya ekonomi yang diperebutkan, maka di antara mereka yang berkonflik telah terjadi pelanggaran aturan main yang bisa jadi telah mereka sepakati. Pelanggaran aturan main tersebut mungkin tidak secara langsung menjadi perseteruan di antara mereka, tetapi karena akumulasi-nya semakin lama maka konflik pun tak bisa dihindari (lihat Trianto, 1999). Jika
ekspresi konflik tersebut merupakan akumulasi dendam yang telah cukup lama, maka di antara pihak yang berkonflik sebenarnya ada asset atau tujuan yang sedang diperebutkan (dikompitasikan).

Kedua, konflik terjadi tidak semata-mata oleh perubahan sumber daya ekonomi, melainkan karena berbagai aspek yang dalam masyarakat lazim disebut sebagai organisasi sosial. Jika konflik dihubungkan berbagai aspek dalam organisasi sosial, maka organisasi tersebut menyajikan pendistribusian kekuan sosial kepada masyarakat secara tidak merata. Jika organisasi menyajikan pendistribusian kekuan yang tidak merata sosial, maka besar kecilnya kekuasaan dalam organisasi sosial menentukan kekuan yang mereka dapatkan (bandingkan pada Davendorf, 1959).

C. Tinjauan Pustaka


Mesialah internal, boleh jadi berlaku kebulatan, seperti misalnya, tertumpahnya minyak cile (milik etnis Tionghoa yang berperan sebagai juragan) yang dilakukan oleh seorang buruh (etnis Jawa). Mesialah peristiwa eksternal, menyebabkan peristiwa (konflik) di luar satuan-satuan sosialnya tetapi karena
peristiwa itu ditafsirkan sebagai konflik sera, maka ia mudah didaftarakat alatan untuk modus pembalasan.

Prakondisi itu akan mendapatkan lahan yang subur ketika bermusnanya dengan tiga hal, yaitu (a) corak kebogbadan masyarakatnya yang mudah marah. Masyarakat Negaraqung dan Pasila memang bukan pada kategori ini, karena (b) di dalam kedua masyarakat itu, mutan kepentingan persaingan kawasan maupun persaingan ekonomi relatif menorch. Corak perjalanan kedua masyarakat ini dapat dilihat dari 'tatarbalang' keseruan kerusuhan di kekerasan sosial di Jawa masa lalu hanya (bandingkan pada 'Tenjaranarangrat', 1984).

Ditua pemikiran konseptual, adalah penulisan kekerasan sosial itu sendiri. Tindakan kekerasan sosial di sini dapat dilihat ke dalam dua aspek, yaitu (e) sifat, dan (b) ekspresi. Setau tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan sosial kalau ia menunjukkan sifatnya, yaitu bersifat massal atau kolektif. Bersifat massal kalau tindakan itu tidak ditubuhkakan melompok tertentu, tetapi bersifat umum.


Darmanto Jatman dan Andriani Sumampouw Soemantri (1988) telah meneliti masalah kerusuhan dan penjerahan yang terjadi di Solo (Mel 1998) dengan menekankan pada gambaran kognisi masyarakat Inhadrup malira kekerasan itu sendiri. Dalam kognisi masyarakat Solo, kekerasan sosial itu

dianggapnya bukan hal baru. Kekerasan sosial ternyata sudah dikenali secara baik oleh masyarakat Bola selidik-tidaknya mulai pada tahun 1911.

Temuan Darmante dan Andriani (1988), rampaknya perlu dikaji lebih lanjut dan lebih kritis. Pertama, bahwa apa yang ditemukan oleh kesuksesan peneliti itu harus diuji dengan metode analitika yang lebih lanjut dan benar. Kedua, hasil penelitian itu belum jelas bagaimana untuk memprediksi atau mampupada untuk hal tersebut.
ini isilah konflik atau kerusakan sosial itu terjadi justru ketika terjadi "ketidakadilan" dalam kaitannya dengan "pengambilan jumiah kayu" itu sendiri termasuk sanki yang diberikan penguasa kepada rakyat.

Pertanyaan lebih lanjut yang belum digali oleh penelitian Agus Maladi ini antara lain: kenapa perempuan mengambil (amek) kayu jati, antara konsep mengambil miliknya (nenek moyangnya) dan menuruti (milik pemerintah); perempuan karena "kelestarian lingkungan" dalam kaitannya dengan "penjarahan secara besar-besaran". Apakah tindakan demikian dilatarbelakangi oleh tidak berlakunya lagi nilai-nilai tradisional atau justru dilatarbelakangi oleh tindakan-tindakan sejumlah aparat kehutanan sendiri yang dinilai telah melunturkan kepentingan menjaga kelestarian hutan? Jika nilai-nilai tradisional seperti yang tercemarnya pada konsep amek itu telah luntur, apakah kalunturan nilai-nilai itu karena ketidakkrampunnya masyarakat setempat dalam menjaga "penjarahan" yang justru dilakukan oleh mereka yang mengakukan lebih "berkuasa" sehingga ketika rakyat ikut menjarah bermakna sebagai sikap frustasi? Hal-hal demikian menjadi sangat penting dicari jawabannya kalau kita ingin mengkonstruksi kognisi mereka mengenai penjarahan dan kekerasan.


Tradisi tawuran itu menurut kedua peneliti ini "terpelihara" karena temperemen warga setempat, bertemperamental tinggi, di samping adu kebiasaan minum-minuman keras. Apekah kebiasaan minum minuman keras yang menyebabkan mereka menjadi bertemperamental tinggi, atau karena...
ber temperamental tinggi sehingga mereka menyukai minuman keras? Indikator apa yang menyebabkan kedua peneliti itu berkesimpulan "penduduk bertemperamental" dan seberapa jauh pengertian "suka minuman keras" ternyata tidak dijelaskannya.


Pertanyaan yang layak digali lebih lanjut adalah: apakah tawuran itu bercorak spontanitas, atau justru sebaliknya, kejadian itu adalah akumulasi berbagai persoalan yang tersumbat sehingga tawuran dipicu sebagai model penyelesaian untuk mengurangi ketegangan-ketegangan psikologis di antara kedua kelompok yang bertikai itu? Atau apakah tidak mungkin di balik tawuran itu, terdapat pihak yang diuntungkan? Jika ada pihak yang diuntungkan, dan mereka sadar terhadap hal itu, mengapa pihak yang diuntungkan lebih memilih modus "tawuran" bukan pada "kerjasama"?

Nurdien H. Kistanto (1998) yang meneliti masyarakat peselairan yaitu masyarakat Pekalongan dalam kasus "Sembekel" (Semangat Membakar Toro) menyimpulkan bahwa kerusuhan itu terjadi karena antara lain arogansi pejabat pemerintah terhadap rakyat dalam rangka memenangkan partai Golok pada Pemilu 1997 lalu. Pada tataran empirik, istilah "arrogansi pejabat pemerintah" sebagai pemicu munculnya kerusuhan di kois Pekalongan, menang dapat dipahami. Telap penyederhanaan penyimpulan demikian ini berkesan sebagai temuan jurnalistik, sebab sebagaimana dikemukakan pada bagian latar belakang di atas, kerusuhan dan kekerasan sosial sangat boleh jadi merupakan
D. Tujuan Penelitian

Pertama merekonstruksi pemahaman mendasar tentang kekerasan sosial dalam kebudayaan atau akar kebudayaan masyarakat yang berkonflik secara sosiohistorik.

Kedua, mengkaji daerah yang bersangkutan dilihat sebagai representasi kategori wilayah kebudayaan, baik menyengkut corak dominan, konfigurasi maupun variasi-variasinya.

Ketiga, dapat menjelaskan fenomena budaya kekerasan sosial dalam konteks kebudayaan atau bukan pada tataran empiriknya.

Keempat, dapat memberi salah satu solusi terhadap munculnya aksi kekerasan yang merusak akhir-akhir ini di Jawa Tengah.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi pada pemecahan masalah pembangunan, terutama menyengkut beberapa hal sebagai berikut: (1) merekonstruksi pemahaman mendasar tentang kekerasan sosial dalam kebudayaan atau akar kebudayaan Jawa secara sosiohistorik, (2) mendeskripsikan wilayah konflik sebagai representasi kategori wilayah kebudayaan, baik menyengkut corak dominan, konfigurasi antara Jawa pedesaan dan pesatiran, maupun variasi-variasinya, (3) menjelaskan fenomena budaya kekerasan sosial dalam konteks kebudayaan atau bukan pada tataran empiriknya, serta (4) dari penelitian ini diharapkan bisa memberi salah satu pemecahan dan sekaligus memberi solusi tentang munculnya aksi kekerasan yang merusak akhir-akhir ini di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa Tengah pada khususnya.

F. Metodologi

F.1. Pendekatan

Untuk menjelaskan fenomena sosial – terutama menyengkut kerusuhan sosial di Kabupaten Tegal – dalam penelitian ini akan menggunakan model pendekatan yang dikembangkan oleh Erv'n Goffman (1976) yang lazim disebut sebagai "teori panggung" (the stage art theory). Goffman memperkenalkan suatu model penjelasan terhadap suatu peristiwa dengan istilah impression
manajemen dengan bertolak pada stage art model explanation. Yakni sebuah pengamatan terhadap ekspresi fenomena sosial seperti laiknya kita menconton pertunjukan drama di atas panggung.

Sejalan dengan pendekatan Goffman tersebut, maka yang perlu dicermati dalam penelitian ini secara garis besar menyangkut tiga unsur utama – seperti laiknya pertunjukan drama. Ketiga unsur utama tersebut meliputi: latar (setting), para pemain (actors), dan alur peristiwa (plot).

Latar dalam pertunjukan drama – mengacu pada pendekatan Goffman (1976)- menyangkut panggung yang menjadi "areana pertunjukan" atau "arena bermain". Latar dalam hal ini bisa berarti panggung secara fisikal maupun panggung dalam arti latar belakang sosial budaya. Panggung sebagai latar fisikal, pada dasarnya dibagi menjadi tiga unsur, yakni panggung depan (front stage) yang secara formal dijadikan arena permainan, panggung belakang (back stage) yang secara informal justru melatarbelakangi konsep pengadeganan, dan tempat penonton (audience) yang secara langsung tidak terlibat dalam peristiwa pertunjukan.

Panggung depan dalam kasus kerusakan sosial di Tegal secara formal bisa kita identifikasi sebagai tempat, pelaku, waktunya peristiwa berlangsung. Pengamatan pada panggung depan, kemungkinan yang kita bisa lihat kapan, siapa, dimana, dan bagaimana peristiwa kekerasan sosial itu berlangsung. Akan tetapi, menyangkut latarbelakang dan motivasi peristiwa pembunuhan dan munculnya aksi pembakaran rumah perlu diambil dari latar panggung belakang, Proses yang melatarbelakangi kekerasan sosial yang tidak terlibat dari wilayah audience, tetapi bisa diperhatikan dari panggung belakang.

Sementara wilayah audience yang merupakan wilayah semestinya tidak terlibat langsung terhadap "proses pertunjukan", dalam mengamati fenomena sosial pada dasarnya dapat kita interpretasikan sebagai stimulus intensitas "pertunjukan". Sebagai misal, tepuk tangan penonton akibat dari simpati terhadap adegan dan karakter tokoh, adalah bagian dari terciptakannya munculnya stimulus intensitas sehubungan pertunjukan drama. Kalaupun saja kita mengamati bahwa "tepuk tangan" tersebut sebagai bentuk fenomena sosial maka suasananya euforia di sejumlah tempat akibat dari globalisasi informasi yang
diekspresikan dengan pembakaran bahan pembunuhan, adalah stimulus bagi warga pelaku konflik melakukannya kekerasan sosial.

Lebih dari itu, gambaran later kekerasan sosial di Kabupaten Tegal pada dasarnya tidak hanya sebatas pengamatan terhadap panggung secara fisik, dalam pengamatan fenomena sosial kita juga akan melihat panggung sebagai latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya inilah yang kemudian menjadi kisi posisi panggung secara fisikal. Artinya, peristiwa karusah sosial tersebut pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial budaya masyarakatnya.

Sementara itu selain later (setting) unsur lain dalam drama adalah tentang para pemeran (actors). Pemeran dinamika sosial tidak hanya yang tampak di atas panggung depan (front stage), tetapi para pemeran yang ada di panggung belakang (back stage) juga bagian yang tak terpisahkan menentukan "adegan pertunjukan". Mereka yang di panggung belakang, seperti sutradara (director), dan penulis skenario.

Dalam setiap "pertunjukan" yang cenderung tampak biasanya para pemeran hanya yang terlihat di atas panggung atau panggung depan. Dalam wawas kekerasan di Tegal misalnya, mereka yang dianggap pemeran kekerasan kemungkinan hanya mereka yang bertindak sebagai pembunuh atau pembakar rumah. Akan tetapi, berperan (character) sebagai pembunuh atau pembakar rumah, kemungkinan hanya sekadar nomena tugas (casting) yang diberikan, sutradara. Sementara sutradera mengatur adegan barasma sesuai dengan skenario yang ditelapak oleh penulis skenario.

Dengan demikian dalam hal pemeran dan terdapat flow hierarkis, sejakt dari penulis skenario "pertunjukan", kemudian diinterpretasikan oleh sutradara, seterusnya sutradara memberi casting kepada pemeran di panggung (actors) untuk memerankan karakter berdasarkan interpretasi sutradara. Seorang pemeran di panggung hanya sebagai mediator ekspresi dari penulis skenario berdasarkan interpretasi sutradara.

Bertolak dari kenyataan struktur hierarkis tersebut, pada dasarnya secara politis seorang penulis skenario mempunyai posisi teratas, sementara pemeran di panggung berada dalam posisi terbawah. Bila dilihatkan lebih jauh, seorang penulis skenario jauh lebih leluasa menentukan dinamika konflik cerita.
sementara pemeran di panggung hanya sekedar menjadi penyampai konflik yang sia-sia tahu mereka tak paham benar ide, gagasan, substansi konflik tersebut. Lalu pada struktur mana sebenarnya mempunyai posisi strategis menentukan dinamika konflik?

Secara penulis skenario secara struktural semestinya mempunyai posisi strategis dan prestisius dalam menarikan peran sentral dalam politik pertunjuan drama, akan tetapi ia tak mungkin terlibat langsung dalam penentuan pembagian peran terhadap para pemeran panggung (actors). Demikian pula actors bisa dengan jelas terlibat peran dan actingnya di atas panggung, tetapi mereka tak mempunyai kualifikasi moral menentukan skenario. Actors bisa saja berperan sebagai orang atau tokoh lain, tetapi hanya sebab pemeran dan penampil dialog yang kemungkinan tak menahami substansi cerita atau lekson tersebut. Yang paling strategis justru posisi sutradara, ia berada pada lapis tengah yang diduduki oleh penata kostum, penata musik, penata cahaya, serta penata arsitektur yang lain, lebih leluasa berkomunikasi dengan penulis skenario dan berhak menentukan casting yang sekaligus mengatur penampilan actors.

Sutradara meskipun secara struktural di bawah posisi penulis skenario, namun ia lebih strategis, baik dalam menginterpretasikan keinginan penulis skenario maupun menentukan permainan para pemeran panggung (actors). Kestategisan, itu juga didukung oleh beberapa unsur yang posisinya setara dengan sutradara – seperti penata musik, penata kostum, penata cahaya, dan penata arsitektur lainnya – tetapi secara politis tidak mempunyai kekuasaan tertadap actors.

Dengan demikian pengertian pemeran dalam hal ini tidak hanya dibatasi para pelaku pembuahan dan pembakaran rumah senaten, tetapi investigasi yang perlu dikembangkan adalah siasa yang menjadi sutradara dan penulis skenario "pertunjukan" kekerasan sosial di Kabupaten Tegal ini.

Lebih dari itu, kalau kekerasan sosial yang terjadi di Tegal bisa diinterpretasikan lebih jauh 'lemmyata para pemeran di panggung belakang ini jauh lebih variatif dibandingkan para pemeran di panggung depan. Masing-masing pemeran kekerasan sosial tidak hanya yang terlibat pada wileayah panggung tetapi kemungkinan besar mereka menjadi pemeran sesuai dengan
status sosial mereka. Artinya, pemeran yang secara formal bercerita di panggung depan sebagai pembunuh dan pembakar rumah, kemungkinan besar mereka juga menjadi pemeran untuk mempertahankan status sosial mereka. Yang menjadi pertanyaan, adalah bagaimana para pemeran di panggung belakang tersebut kemudian menentukan casting terhadap pemeran di panggung depan demi mempertahankan status sosial mereka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan pengkajian terhadap unsur ketiga dari idiom panggung, yakni alur peristiwa (plot). Yang dimaksud dengan alur peristiwa dalam hal ini tidak hanya terbatas pada sambungan sinembung peristiwa semata, namun ia lebih jauh menyangkut proses terciptanya "pertunjukan drama". Akibat kekerasan sosial yang terjadi di Tegal pada dasarnya bukan, sebuah peristiwa spontan, ia terjadi akibat dari suatu proses interaksi sosial "antar pilar pemeran" yang dibatasi oleh ruang dan waktu dalam setting sosial masyarakat. Pertimbangan ruangan dan waktu itulah yang semudah menandai penentuan waktu (timing) aksi kekerasan sosial terjadi.

Maka sejalan dengan aksi kekerasan sosial di Tegal, tentunya tidak bisa dilafal secara sepuluh-sepuluh. Seperti halnya sebuah pertunjukan drama panggung, ia marupakan "kerja" kolektif yang dilatarbelakangi hubungan antar unsur (teknik, politik, dan kultural).

1.2. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

2 Dalam adegan drama sering dibuat pola sederhana ruang dan waktu. Artinya setiap ingat leluh arah (acting) di atas panggung harus menjadi satu kesatuan aksi yang memerlukan ketepatan waktu (timing) dan ketepatan ruang (spaceing). Akan dan di mana adegan harus dipertahankan memberi batasan yang tegang dalam sebuah pertunjukan di panggung.
Observasi, wawancara, dan FGD — pada proses awal di lapangan, bortolak dari asumsi-asumsi teoritis. Namun pada langkah-langkah berikutnya, ketiga metode itu harus dikembangkan sesuai dengan temuan-temuan lapangan. Untuk melihat dan menggali lebih lanjut temuan-temuan itu, selama di lapangan — tim peneliti akan melakukan dua pekerjaan yang saling terkait.

Pertama, mengumpulkan data sesuai dengan metode yang dianggap paling cocok terhadap permasalahan dan informan, dari kantua, mendiskusikan kembali bersama tim. Sedangkan tahap analisis data akan digunakan model analisis kebudayaan, yakni analisis yang lebih mengutamakan penjelasan secara kategorikal dan bukan berhenti pada dukungan angka-angka.